

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori- Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Augustinus Pohan, et all., 2008, *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dewi, E. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herimulyanto, A. (2019). *Sita berbasis nilai pengembalian aset tindak pidana korupsi: teori dan terapan value-based confiscation system dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Genta Publishing.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Kemendikbud, R. I. (2013). *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Progresif*, Jakarta: Gramata Publishing, Tahun 2012.

- Nasional, B. P. H., Hukum, K., & RI, H. A. M. (2013). *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: BPHN
- Nugraha, H. P. (2019). Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul. *Skripsi* untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2019.
- Panggabean, D. H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana edisi revisi. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Pratama, S. (2023). Reformasi Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis.
- RI, B. D. K. M. A. (2007). Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum. *Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Wibowo Agus, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Wijayanto, R. (2024). Penguatan Kelembagaan KPK dalam Era Digital. Jakarta: Rajawali Press.

Zainuddin Ali (2017). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Alatas, M. A. M., Pawennei, M., & Kamal, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1556-1571.

Amalia Rizki, *Analisis Yuridis Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 3, no. 1 (2021): 15-30.

Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1-51.

Artikel Jurnal: Hamzah, A. (2015). *Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(3), 45-60.

Endira, A., & Marwenny, E. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang). *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 50-59.

Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.

Indriana Yayan, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo, 2018, Vol. 2, No. 2.

Jurnal Hukum Pidana, "Mekanisme Penyitaan Aset Korupsi", Vol. 12, No. 3, Tahun 2019.

- Kaligis, R. V. (2020). *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen*, 9(1).
- Kuntamas, N., & Shoommuangpak, P. (2020). Structural equation modeling of guidelines to enhance the potential of tapioca starch export processing industry. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(1), 1-12.
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1-11.
- Lamijan, Tohari Mohammad, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*, JPeHI, 2022.
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.
- Marpaung, L. (2009). *Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15, No. 2.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nugraha B, dkk, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Aset Korupsi" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2023.
- Purba, I. G., & Suwito, S. (2021). Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang

- Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Normatif*, 1(1), 56-63.
- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2014). Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. *Padjadjaran Law Review*, 2, 34-36.
- Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 576-581.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Sulistiani, S., Hafrida, H., & Monita, Y. (2023). *Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62-73.
- Sumaidi, S. (2017). Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(1), 220-244.
- Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). *Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. UNES Law Review*, 6(1), 3818-3831.

C. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Lain-lain

Dian Dewi Purnamasari, *Tahun 2024, Skor Indeks Persepsi Korupsi Naik*, Kompas.Id, 2025, Tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/ipk-2024> diakses tanggal 14 Februari 2025, Pukul 21.01 Wib.

Mulkan, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Sanders, R. L. *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)*. Tersedia di <https://repository.unsri.ac.id/8641> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 Pukul 11.30 Wib.

Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di*

Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7. Tersedia di <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101> diakses tanggal 11 Desember 2024 Pukul 11.58 Wib.

Tersedia di <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187> diakses tanggal 11 Desember

2024 Pukul 11.40 Wib.

Tersedia di <https://repository.upstegal.ac.id/5186/3> diakses pada tanggal 12 Desember 2024 Pukul 20.37 Wib.

Wawancara dengan Rahmat Syarif,S.H,.M.H selaku Jaksa Penyidik pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol, pada hari Rabu 12 Februari 2025, Pukul 10.00 Wib di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ruang Tindak Pidana